

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

INTISARI

Oleh:

Indri A Nurhandayani¹ dan Supriyadi²

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga dalam Pemerintahan Republik Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam bidang penegakan hukum

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu merupakan penggabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hal tersebut dikarenakan penelitian dalam tesis ini menggunakan 2 (dua) data, yaitu data primer dan data sekunder. Pencarian data primer dilakukan dengan metode wawancara secara langsung kepada responden dan narasumber dengan alat pengumpul data berupa melampirkan daftar pertanyaan di atas selembur kertas yang akan dijawab secara langsung oleh responden dan narasumber. Pencarian data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen

Hasil penelitian dan pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut : *Pertama*, kurang pemahaman dan perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum terhadap komponen utama tindak pidana perdagangan orang. *Kedua*, sulitnya menghadirkan saksi korban tindak pidana perdagangan orang di persidangan. *Ketiga*, sebagai salah satu kejahatan lintas negara tindak pidana perdagangan orang melibatkan pelaku/ saksi yang berada di luar negeri yang membawa dampak kesulitan dalam penegakan hukum. *Keempat*, problematika dalam penuntutan dan pembayaran restitusi. *Kelima*, sulitnya melakukan penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: penegakan hukum, tindak pidana perdagangan orang

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta.

² Pengajar, Guru Besar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

THE RULE OF THE PROSECUTOR IN LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS TRAFFICKING IN PERSONS.

ABSTRACT

By:

Indri A Nurhandayani³and Supriyadi⁴

Procecutor's office as one of the institutions in the Republic of Indonesia goverment has an important function and position in the Indonesian constitutional system especially in the field of law enforcement.

This research is an empirical-normative-law study as the combination of normative law research and empirical law research. This type of study is selected due to the utilization of 2 (two) data, namely primary and secondary data. The primary data collecting was conducted through direct interviews towards respondents and informants by using the data collecting instrument in the form of a paper listed with questions which will be answered directly by the respondents and informants. The secondary data collecting is conducted through literature study with the data collecting instrument of document study

The result f the research art discussion of this thesis are as follows : *First*, there is lack of understanding and differences an interpretation between law enforcement officers and towards the main component of criminal trafficking in persons. *Secondly*, it is difficult to present witnessses to victims of human trafficking at the trial. *Third*, as one of the transnational crimes criminal acts of trafficking involving perpetrations/witnessses who are aboard which bring the impact of difficulties in law enforcemnet, fourth, problem in prosecution and restitution. *Fifth*, the difficulty of prosecution coporations as perpetrators of criminal act of trafficking.

Keywords: law enforcement, criminal act of trafficking in persons.

³ Student of Legal Master Degree Program at Gadjah Mada University Jakarta Campus.

⁴ Lecturer, Professor of Legal Master Degree Program at Gadjah Mada University Yogyakarta.